

ABSTRAK

Ketidakjelasan administrasi pertanahan di masa lalu, ditambah dengan fluktuasi nilai tanah, telah memicu sengketa antara masyarakat adat dan pemerintah di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Sengketa ini muncul akibat klaim kepemilikan lahan yang tumpang tindih antara dua suku, yakni suku Sobey dan suku Berik serta perbedaan persepsi mengenai nilai tanah antara masyarakat adat dan pemerintah dalam proyek pembangunan jembatan Tor. Penelitian ini bertujuan memahami dinamika penyelesaian sengketa tersebut menggunakan teori manajemen dan resolusi konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi menjadi kunci penyelesaian sengketa, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diimplementasikan melalui Peraturan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Adat Sarmi.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Kebijakan Pemerintah, manajemen dan resolusi konflik Tanah Ulayat

ABSTRACT

The ambiguity of land administration in the past, coupled with fluctuations in land value, has triggered disputes between indigenous communities and the government in Sarmi Regency, Papua Province. This conflict arose from overlapping land ownership claims between two tribes the Sobey and Berik tribes and differing perceptions regarding land value between the indigenous people and the government in the Tor Bridge development project. This study aims to understand the dynamics of conflict resolution using conflict management and resolution theories. The research employs a qualitative approach and a case study method, with data collected through interviews, observations, and literature review. The findings indicate that negotiation serves as the key mechanism for resolving the dispute, leading to a mutually beneficial agreement that can be implemented through a Regent Regulation on the Recognition and Protection of the Sarmi Indigenous Peoples.

Keywords: Indigenous Community, Government Policy, Conflict Management and Resolution, Customary Land